



ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ITS BAT NIKAH

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



Disusun Oleh :

RESTI AYU RAHMADANI

NIM: 11521201497

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU

RIAU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 101/Pdt.P/2015/Pa.Bkt Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 Tentang Itsbat Nikah** yang ditulis oleh:

Nama : Resti Ayu Rahmadani

NIM : 11521201497

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

Hj. Mardiana, M.A

NIP: 19740410 199003 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/ 2016 TENTANG ISBAT NIKAH**, yang ditulis oleh :

Nama : **RESTI AYU RAHMADANI**
 NIM : **11521201497**
 Program Studi : **Hukum Keluarga (AH)**
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Selasa/ 22 Oktober 2019**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

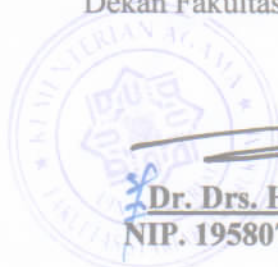
Ketua
Nurlaili, Dra.M.Pd

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi B, M.Ag

Penguji II
Saswir, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Resti Ayu Rahmadani (2019) : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 Tentang Isbat Nikah.

Latar belakang penulis mengambil judul ini dikarenakan terjadi perbedaan dalam pengambilan putusan terhadap perkara isbat nikah pada perkara yang sama di tingkat peradilan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan pada Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 tentang isbat nikah dan mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari data primer berupa putusan, dan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian seperti Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa yang penulis gunakan adalah content analisis yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa putusan mahkamah Agung mengabulkan untuk mengisbatkan pernikahan adalah karena telah terbukti adanya perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Desember 1995 karena telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara hukum Islam yaitu adanya wali, pasangan suami istri, saksi, dan dilengkapi dengan mahar pernikahan. Ditinjau dari maqashid syariahnya maka putusan Mahkamah Agung ini memberikan maslahah kepada para pemohon, karena dengan ditetapkannya isbat ini kebutuhan dharuriyah Pemohon dengan mempertimbangkan untuk memelihara keturunan dan harta akan terwujud. Dengan disahkannya pernikahan ini maka pemohon akan mendapatkan bukti nikah, dan dengan ini pemohon akan mudah dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan akta nikah nantinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ITSBAT NIKAH, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun. Untuk itu Penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibunda ku Fauza beserta saudara dan saudariku; Taufik Hidayat, Eggi Nugraha, Mega Wahyuni, dan Anisa Vio Rizka yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.
2. Bapak Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H, Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan beserta staf yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses perkuliahan Penulis.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Hj. Mardiana, MA selaku Pembimbing Skripsi serta Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak H. Rahmad Mulyadi, A.Md.,SH selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam pencarian data.
7. Teman-teman angkatan 2015 khususnya jurusan Hukum keluarga B Uin Suska Riau beserta teman-teman seperjuangan *Sobat Misqueen* Andrisa Alifni, Apriliana Sari, Putri Rahmatul Huda, Putri Yanti, Siti Asiyah, dan Wenti lusi yang turut serta memberikan semangat, masukan serta sarannya. Dan juga teruntuk sahabatku Rahma Mustika yang telah menemani penulis selama ini.
8. Teman-teman *Al-muqaawamah Generation* Nur'aini, Novita Putri Idola, dan Rahma Elsa Fitriani yang sama-sama berkuliah di UIN Suska Riau bersama penulis.
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Sebagai penutup penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Pekanbaru, 12 September 2019

Penulis

RESTI AYU RAHMADANI
NIM: 11521201497

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Masalah.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Subjek dan Objek Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Penulisan.....	9
6. Teknik Analisa Data.....	10
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II: GAMBARAN UMUM..... 12

A. Peradilan Agama	14
B. Mahkamah Agung.....	17
C. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	19
D. Produk Peradilan Agama.....	21

BAB III: KERANGKA TEORI..... 26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pengertian Isbat Nikah	26
B. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	27
C. Syarat Isbat Nikah	30
D. Tata Cara Isbat Nikah.....	31
E. Tujuan Isbat Nikah	34
F. Maqashid Syariah.....	35
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	35
2. Pembagian Maslahat	38

BAB IV: ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ISBAT NIKAH

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 Tentang Isbat Nikah	45
B. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 tentang Isbat Nikah	54

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang terjadi di Indonesia tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah. Pernikahan pada masa itu telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Maka setelah diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di Indonesia setiap pernikahan harus di catatkan ke Pegawai Pencatat Nikah.

Syariat Islam baik al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, yang diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Pengakuan adanya perkawinan atau ikrar adanya perkawinan dapat diterima dengan keterangan para saksi, dengan syarat perkawinan itu sudah diketahui oleh umum. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasannya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Kadang-kadang terjadi dua orang pria dan wanita mengaku sebagai suami istri tanpa surat kawin (Akta Nikah), kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang yang lainnya membantah di depan pengadilan. Ada pula sementara orang yang mengakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta, karena fiqih memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum dalam perkawinan. Karena itu orang memerlukan Akta Nikah untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan yang timbul, maka diperlukan adanya peraturan-peraturan yang ketat.¹

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan dan percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mendapatkan haknya masing-masing.²

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Akta Nikah selain merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Misalnya, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara sebenarnya ia

¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 2011), h.82.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu, atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Akta Nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan Akta Nikah.

Disatu sisi perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti yang telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan penetapan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 kompilasi hukum islam yang menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum *fiqh* pernikahan itu telah sah.³

Menurut Pasal 7 KHI, isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal: “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”. Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris mewaris para istri dan anak-anak yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapati keputusan Pengadilan Agama yang menolak isbat nikah ketika

³Faizal Bafadhal, *Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami istri masih hidup sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukan permohonan isbat nikah.⁴

Tentang syarat isbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah pada dasarnya adalah suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan itu telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Namun sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan yang mereka tidak mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatatan Nikah, hingga akhirnya mereka yang tidak mempunyai Akta Nikah. Apabila mereka ingin membuat surat atau berkas seperti pembuatan Akta Kelahiran anak ataupun Kartu Keluarga atau ingin mengajukan perceraian dan masalah lainnya akan terhambat karena semuanya butuh bukti atas pernikahan mereka yaitu berupa Akta Nikah. Maka mereka mengajukan ke Pengadilan Agama agar ditetapkan pengesahan pernikahan mereka secara hukum.

⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah putusan penulis menemukan perkara tentang isbat nikah di Pengadilan Bukittinggi Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt yang didalamnya didalilkan bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 08 Desember 1995, di kampung halaman orang tua Pemohon II dihadapan Qadhi yang bernama Abdul Aziz, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi bernama Habiburrahman dan Andi, dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,-, tunai.

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syariat Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II penuhi, namun karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan kepada pejabat yang berwenang tersebut, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak Mempunyai Akta Nikah.

Agar Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus Akta Kelahiran anak mereka, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menanggapi permohonan ini, majlis hakim tingkat pertama setelah memeriksa dalil permohonan berpendapat bahwa perkara tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilanjutkan pemeriksaannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuktian dimana Pemohon I dan Pemohon II membawa bukti surat dan juga bukti dua orang saksi.

Setelah majelis hakim memeriksa alat bukti yang di hadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan, majlis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak.

Hal ini yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, sehingga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan melampirkan memori kasasi dengan perkara Nomor 72/K/Ag/2016.

Setelah majlis hakim tingkat Mahkamah Agung mempelajari dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt dan memeriksa memori Kasasi Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap alasan-alasan yang terdapat dalam memori kasasi itu dapat dibenarkan. Karena Pengadilan Agama Bukittinggi telah keliru dalam menerapkan hukum, maka dari itu penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi harus dibatalkan.

Dari pemaparan di atas jelas terdapat perbedaan pendapat antara majlis hakim tingkat pertama dengan majlis hakim Mahkamah Agung dalam sebuah pokok perkara yaitu perkara isbat nikah, juga menyebabkan hasil putusan yang berbeda. Hal ini membuat penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sebuah karya ilmiah, skripsi yang berjudul “ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ISBAT NIKAH”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Agung nomor 72/K/Ag/2016 tentang perkara isbat nikah.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor. 72/K/Ag/2016 tentang isbat nikah?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor. 72/K/Ag/2016 tentang isbat nikah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Ag/2016 tentang itsbat nikah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Ag/2016 tetang itsbat nikah.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 72/k/Ag/2016 tentang isbat nikah.
3. Hasil penelitian diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pembaca.

E. Metode Penelitian

Agar dapat tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016.

- b. Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah tentang isbat nikah.

3. Sumber data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif*, yaitu penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder⁵, dan sumber datanya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan primer

Bahan primer pada penelitian ini yaitu data yang diambil langsung dari putusan Mahkamah agung perkara Nomor. 72/K/Ag/2016.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, buku-buku Ushul fiqh, Jurnal dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016, juga buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang dalam hal ini penulis berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah

⁵J Suprianto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), Cet.1, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
 - b. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh.
6. Teknik analisis data

Analisa data yang penulis gunakan adalah metode *content analisis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan membahas tentang gambaran Peradilan Agama dan Mahkamah Agung secara umum, tentang hakim dan kekuasaan kehakiman, serta produk Peradilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: Bab ini terdiri dari pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, syarat isbat nikah, dan tata cara isbat nikah, dan juga membahas mengenai Maqashid syariah.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan yang pertama yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 tentang isbat nikah, yang kedua analisis maqashid syariah terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 tentang isbat nikah.

BAB V: Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan mengemukakan saran dari penelitian yang berhasil penulis analisa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara, itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, disamping peradilan Umum, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga *tahkim* yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Muslim di kepulauan Nusantara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan dan menjadi komponen agama islam.⁶

2. Kekuasaan pengadilan agama

Dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah. Mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam dan berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.278-279.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.⁷

3. Pengadilan Agama Bukittinggi

Lembaga Peradilan Agama pertama yang ada di kota Bukittinggi adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah, didirikan berdasarkan desakan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya kepada tokoh-tokoh agama atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan perkara mereka di bidang hukum syariah khususnya terkait dengan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR). Ketua Mahkamah Syariah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman ar-Rasuli (Inyiak Canduang) yakni dari awal dibentuk (tahun 1947 dengan SK tanggal 17 Juni tahun 1947) sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya: H. M. Shiddik, H. Said dari Batu Sangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua, dan Syaikh Lathif Syakur. Sebelum tahun 1947 Belum ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda, oleh sebab itu pula setiap keputusannya tidak memperoleh *executoir verklaring* dari Landraad. Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa penjajahan itu disebut

⁷Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), H. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang Jum'at, rapat ulama, dan rapat agama. Sebelum tahun 1947 orang lebih banyak menyelesaikan masalah semanya saja, melalui Qadhi Masjid dan juga ada penyelesaian secara kekeluargaan, tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga Peradilan.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama di Bukittinggi memiliki nama Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah. Setelah hilangnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah yang diketuai oleh Syaikh Sulaiman ar-Rasuli maka berdasarkan PP No. 45 tahun 1957 Jo. Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 No. J.P. 18/7/6 tentang kedudukan Pengadilan Negeri dan kejaksan Pengadilan Negeri Jo. Penetapan Menteri Agama no 58 tahun 1957 dibentuklah 54 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dan 4 Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah provinsi diantaranya adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah. Setelah pindahnya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Provinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang seiring dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di daerah lain, yaitu:

1. PA Bukittinggi yang diketuai oleh H. Syarbaini
2. PA Payakumbuh yang diketuai oleh Mukhtar Angku Lakuang
3. PA Padang Panjang yang diketuai oleh Abdul Manaf Idris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. PA Batu Sangkar yang diketuai oleh H. M.Djalil Dt. Malinjun
5. PA Padang yang diketuai oleh Silahidin Yunus.

Masalah yang disidangkan di Pengadilan Agama Bukittinggi terkait dengan masalah Hukum Keluarga (perceraian), wakaf, waris, zakat, hibah, harta bersama (imti'atu ad-dar), dan shadaqah. Yurisdiksi Pengadilan Agama Daerah Kota Madya Bukittinggi ditambah dengan wilayah Agam Timur termasuk kecamatan IV Koto. Pembinaan Pengadilan Agama ketika itu, termasuk PA Bukittinggi sampai lahirnya UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Keppres No. 41 tahun 2004 dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Agama.⁸

B. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung yang disingkat MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang

⁸<http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/sejarah-pa-bukittinggi>, diakses pada tanggal 31 mei 2019, 14.30 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan diangkat oleh Presiden.⁹

Menurut UUD 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan.

Menurut UUD 1945, Pasal 24A angka 1 undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa mahkamah agung berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut UU nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus

⁹Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum, Vol.II, No.2, April-Juni 2014, H. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara, memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi, menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Adapun wewenang pengawasan meliputi, jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang menyangkut peradilan, dan pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang diperlukan, meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, jaksa Agung, dan pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana, membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dan mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.¹⁰

C. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan

¹⁰*Ibid*, h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.¹¹

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

¹¹Indra Bakhri, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA.Medan*, At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, vol.1 No.1 , Januari –juni, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

D. Produk Peradilan Agama**1. Putusan****a. Pengertian Putusan**

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim peradilan agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.¹²

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).¹³

b. Macam-macam putusan pengadilan

1). Dilihat dari segi sifatnya

- a) Putusan *declatoir* adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- b) Putusan *konstitutif* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru.
- c) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim.

2). Dilihat dari jenisnya

- a) Putusan *sela* adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan *sela* tidak mengikat hakim. Bahkan hakim

¹²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana ,2012) ,h.292.

¹³Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), cet.1, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

- b) Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan itu merupakan putusan akhir.

- c. Kekuatan putusan

- 1). Kekuatan mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Dalam peribahasa hukum disebut “*res judicata pro veritate habetur*” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berpekara. Ini dalam arti positif.

Dalam arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara.

2). Kekuatan pembuktian

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa putusan harus dibuat secara tertulis. Tujuannya ialah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi, atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret maka peristiwa itu telah ditetapkan dan dianggap benar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.

3). Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.¹⁴

2. Penetapan

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *juristidictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapannya hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.¹⁵

Putusan volunter hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam putusan volunter, karena itu pula maka putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.

¹⁴Abdul Manan, *Op.Cit*, h. 309.

¹⁵Mardani, *Op.Cit*, h. 123.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan penggabungan dua kata yang terdiri dari kata itsbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata *أَبَتَ-يَبَتَ-يُتَبَتُّ-إِبْنَاتًا* yang artinya menetapkan atau penetapan. Itsbat kata benda yang berarti penetapan, penentuan. Sementara perkawinan adalah terjemahan dari kata “نِكَاحٌ” dan kata “زَوْجٌ”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli yakni “*ad-dammu (الضَّمُّ)*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai pula arti kiasan yakni “*wata’a (وَطِئَ)*” yang berarti setubuh, atau “*aqad (عَقَدَ)*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁶

Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia isbat nikah adalah penyuguhan, penetapan, pengukuhan, ketetapan. Mengisbatkan artinya menyuguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).¹⁷ Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.¹⁸

¹⁶Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia*, al-manahij, vol.XI No.2, desember 2017, h. 234.

¹⁷Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), cet. ke-9, h. 191.

¹⁸Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, 2013, h.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Isbat nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami-istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara sirri. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Gabungan kata isbat dan nikah sebagai kata mejemuk ini menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan atau gugatan dari pihak yang berkepentingan. Isbat nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah berdasarkan penetapan pengadilan agama tersebut.

B. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun

¹⁹Armalina, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Isbat Nikah*, Qiyas, Vol.3, No.2, Oktober 2018, h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan:²⁰

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1 UU No.14 tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh undang-undang.

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus

²⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001, h. 15-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.²¹

Permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diatur pasal 7 ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* (alasan/tujuan hukum) dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.²²

Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-undang perkawinan. Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat hukumnya. Kedua, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran *teleogis* (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak *stagnan*

²¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/1593/6/Bab%202.pdf> diakses pada 24 juni 2019, pukul 16:59wib.

²²Faizah Bafadhal, *Op.Cit*, h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(berhenti), melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Langkah-langkah ini dikenal dengan sebutan penemuan hukum.²³

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan isbat nikah untuk keperluan Akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun. Dengan merujuk pada pasal 32 kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan.

C. Syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

²³Ibid, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

D. Tata Cara Isbat Nikah

Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami-istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan pemohon isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair²⁵, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

²⁴ Mahkamah Agung RI, Op.Cit, h.126-128.

²⁵ voluntair adalah permasalahan perdatayang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan dimana perkara ini tidak mengandung sengketa dengan pihak lain.<https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/>, diakses pada 14 agustus 2019, pukul 14.23 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat contentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat contentius²⁶, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara contentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah dapat diajukan

²⁶contentius adalah perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan Agama/ mahkamah syariah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH²⁷, membuat PHS²⁸ sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau sekurang-

²⁷PMH: penetapan majelis hakim

²⁸PHS: penetapan hari sidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

“menyatakan sah perkawinan antara ...dengan yang dilaksanakan pada tanggal..... di.....”.

E. Tujuan Isbat Nikah

Awal mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (mudayyanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁹

Adapun beberapa akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan diantaranya:

1. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. (pasal 42 dan 43 UU perkawinan).

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya.

F. Maqhasid Syariah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

²⁹M Fajrul Falah, “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contentius Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2017),h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaaf* dan *mudhaafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syariah* itu adalah kata maksud, maka kata *syariah* berarti pembuat hukum (*syari'*) bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid syariah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.³⁰

Abdul mughits dalam bukunya *Ushul fikih bagi Pemula* mengutip pendapat Az-Zuhaili tentang definisi *maqashid syariah* yang terdapat dalam kitabnya, *Ushul Fiqh al-Islami* sebagai berikut:³¹

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

Artinya : *maqashid syari'ah* adalah maksud-maksud dan sasaran-sasaran yang diperhatikan syara' dalam menetapkan seluruh hukum dan bagian-bagiannya yang penting. Dengan kata lain, *maqashid syari'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar *asy-Syar'i* (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 231

³¹ Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikalangan ulama ushul fiqih, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqashid al-syariah* yaitu tujuan *asy-syar'i* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan oleh ulama ushul fiqih tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan *asy-syari'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maslahah*), baik di dunia maupun di akhirat.

Pendapat Al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah* yang dikutip oleh Alaidin Koto, mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Prinsip utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.³²

2. Pembagian maslahat.

³²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua.³³

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنْفَعَةٍ), baik manfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
2. Menghindarkan kemudharatan (دَفْعُ مُضَرَّةٍ), baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enaknyanya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

1. Memelihara agama atau keberagamaan

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

³³Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.

3. Memelihara akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.

4. Memelihara keturunan.

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Sebaliknya dalam rangka *daf'u mudharrah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.³⁴

Dari segi keberadaan masalah menurut syara', maslahat semacam ini menurut Mustafa Asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu:

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah*

Al maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi) sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelapah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khatab bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengqiyaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras

³⁴ *Ibid*, h. 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu dalam QS. An-Nur ayat 24:

Karena adanya dugaan keras orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang yang menuduh berbuat zina. Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

2. *Al-maslahah al-mulghah*

Al-maslahah al-mulghah ialah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Saad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas. Karena bentuk-bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman dua dua bulan berturut-turut. Karenanya ulama usul fikih memendang mendahulukan hukuman puasa dua bulan-berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.

3. *Al-maslahah al-mursalah*

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang rinci kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan oleh syara' baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut dengan *al-maslahah Al-Garibah* (kemaslahatan yang asing). namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti, bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori, sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*, kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* yang dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemsalahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *Al-maslahah al-mulgah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *Al-maslahah al-mursalah*. Pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara' sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.³⁵

³⁵Salma, "*Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*", makalah, h. 4-5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/Ag/2016 mengabulkan isbat nikah, dikarenakan telah terbukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995 dihadapan qadhi yang menikahkan, dan berwalikan ayah dari Pemohon II serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Dan membatalkan penetapan dari Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt.
2. Putusan Mahkamah Agung nomor 72/K/Ag/2016 dilihat dari konsep maqashid syariah telah memuat dan memperhatikan kemaslahatan bagi para pemohon yang mengajukan perkara. Karena telah menerapkan konsep maqashid syariah dengan berusaha menjaga kemaslahatan terhadap kebutuhan dharuriyah para pemohon yaitu memelihara akan keturunan dan harta. Juga telah sesuai dengan konsep kaedah fiqih yang berbunyi الضرر يزال yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Dengan mengesahkan permohonan isbat nikah ini akan menghindarkan pemohon dari mudharat.

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan bekal dan kemampuan yang terbatas ini penulis mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Perkara isbat ini bernilai edukasi kepada masyarakat, karena dengan perkara ini masyarakat dapat memahami dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya identitas hukum atau pengakuan hukum dari pernikahan. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan khususnya tentang pengajuan isbat nikah bagi yang belum mempunyai akta nikah.
2. Saran bagi lembaga peradilan, sudah seharusnya lembaga peradilan yang sudah ada, khususnya kualitas dari penegak hukumnya, agar dalam mempertimbangkan perkara harus diperhatikan secara mendetail agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan.
3. Saran bagi lembaga KUA agar dapat memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya untuk mencatatkan pernikahan ke Pegawai Pencatatan Nikah, agar pernikahan dilindungi oleh hukum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Abdul Mughits. *Ushul Fikih Bagi Pemula*. Jakarta: Cv Artha Rivera. 2008.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Alih Bahasa Oleh Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. Cet.1. 2003.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1998.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. 2013.
- Ahmad Sanusi. *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*. Ahkam: Vol. XVI. No.1. Januari 2016.
- Ali Mutakin. *Teori Maqashid Al-Ayariah Dab Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19. No.3. Agustus 2017.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. Cet Ke-3. 2011.
- Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2014.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Armalina. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Isbat Nikah*. Qiyas, Vol.3. No.2. Oktober 2018.
- Departemen Agama Ri. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. 2001.
- Faizal Bafadhal. *Istbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Maret 2014.
- Gatot Supramono. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Penerbit Alumni. 1995.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenamedia Group. 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

[Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1593/6/Bab%202.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1593/6/Bab%202.Pdf). Diakses 24 Juni 2019. Pukul 16:59 WIB.

[Https://Smjsyariah89.Wordpress.Com/2011/06/10/Pengertian-Gugatan-Dan-Permohonan/](https://Smjsyariah89.Wordpress.Com/2011/06/10/Pengertian-Gugatan-Dan-Permohonan/). Diakses 20 Agustus 2019. Pukul 14:23 WIB.

[Http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/sejarah-pa-bukittinggi](http://pa-bukittinggi.go.id/en/tentang-kami/sejarah-pa-bukittinggi), diakses pada tanggal 31 mei 2019, 14.30 wib.

Indra Bakhri. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/Pa.Medan*. At-Tafahum: Journal Of Islamic Law. Vol.1 No.1. Januari –Juni. 2017.

Suprianto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003. Cet.1.

Kevin Angkouw. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*. Lex Administratum, Vol.II. No.2. April-Juni 2014.

M Fajrul Falah. “*Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contentius Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Uin Raden Intan. 2017.

Mahkamah Agung Ri. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta. 2013.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Mui Bidang Sosial Dan Budaya*. Penerbit Erlangga. 2015.

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada. 2014.

Muh. Jamal Jamil. *Pembuktian Di Peradilan Agama*. Jurnal Al-Qadau. Vol.4. Nomor 1. Juni 2017.

Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Penerbit Merah Putih. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Percetakan Galangpress. 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72/K/Ag/2016

Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 101/Pdt.P/2015/Pa.Bkt



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramdani Wahyu Sururie. *Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Al-Manahij. Vol.Xi. No.2. Desember 2017.

Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”. Makalah.

Salman Alfarisi. *Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur*. Al-Hukama: Vol.8 . No. 1. Juni 2018.

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2011. cet. ke-9.

Teguh Samudera. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 2004.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2014.

Wahbah Az-Zuhaili,. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Rahmad Effendi bin Mainurlis St. Basa, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Patangahan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Fitriza binti Mawardi St. Pamenan, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Patangahan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 08 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register perkara Nomor 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt. tanggal 08 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 08 Desember 1995, di kampung halaman orang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua Pemohon II di Desa Setia Andilan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dihadapan Qadhi yang menikahkan bernama Abdul Aziz, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mawardi, dengan saksi-saksi bernama Habiburrahim dan Andi, dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,-, tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejak dan Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II, di Jorong Patangahan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai anak 5 orang yang bernama :
 - 4.1. Nia Fitri Effendi, perempuan, lahir tanggal 03 Februari 1998;
 - 4.2. Rahma Dwi Lavenia Effendi, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2000;
 - 4.3. Fikri Putra Effendi, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2004;
 - 4.4. Abil Alfarizi, laki-laki, lahir tanggal 06 Februari 2007;
 - 4.5. Fahry adityya Effendi, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2015;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Rahmad Effendi bin Mainurlis St. Basa) dengan Pemohon II (Fitriza binti Mawardi St. Pamenan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1995, di Desa Setia Andilan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada PPN yang berwenang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rahmad Efendi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di-*nazegeling*, tanggal 15 Mei 2015, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fitriza, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah di-nazegeling, tanggal 19 Mei 2012, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. Yusrizal bin Nurdin, saksi adalah famili Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di rumah wali hakim di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dan saksi hadir saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak ingat lagi, akan tetapi bukan yang bernama Abdul Azis karena saksi mengenal Abdul Azis adalah berprofesi sebagai kepala desa di di daerah tersebut, dan yang menjadi wali nikahnya saksi juga tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sirin;
- Bahwa setahu saksi maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak lima orang anak, sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II utuh tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II serta Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II hilang, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anak;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Habib bin Amiruddin, saksi adalah sahabat Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Pasaman Barat, dan saksi hadir saat akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi Qadhi nikah, wali nikah dan saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu;
- Bahwa setahu saksi maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak lima orang anak, sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II utuh tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II serta Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah punya buku nikah akan tetapi sekarang sudah hancur, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mendatangkan tambahan saksi-saksinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan saksi lagi dan telah mencukupkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya memberikan keterangan sepanjang tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi tahun 1995 di Pasaman Barat, tentang status Pemohon I dan Pemohon II ketika perkawinan dilaksanakan dan serta keadaan Pemohon I dan Pemohon II ketika hidup dan berkumpul dalam rumah tangga, sedangkan keterangan lainnya yang berhubungan dengan rukun dan syarat perkawinan menurut syari', kedua saksi tersebut menyatakan tidak tahu dan tidak ingat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, bahwa pernikahannya dilaksanakan dihadapan Qadhi nikah bernama Abdul Aziz, wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Mawardi, saksi pernikahan bernama Habiburrahim dan Ardi dengan mahar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan setahu saksi Abdul Aziz itu adalah Kepala Desa di Talamau bukan Qadhi Nikah, sedangkan saksi pernikahan adalah saksi sendiri beserta yang namanya Sirin dan maharnya berupa seperangkat alat shalat, sedangkan saksi II menyatakan tidak ingat dan yang saksi ingat maharnya adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada keterangan saksi-saksi tersebut diatas, majelis hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya sepanjang yang menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya Calon suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan adanya Ijab Kabul tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya lebih lanjut, Majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon I maupun Pemohon II untuk dapat mendatangkan bukti baik berupa bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi di persidangan, namun Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi dan kedua nya telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon penetapan dari Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (*Seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Fardinal Tanjung**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Tiniwarti AS, MA.** dan **Dra. Tuti Gumila** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zulyetti** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA.

Drs. FARDINAL TANJUNG

Hakim Anggota,

ttd

Dra. TUTI GUMILA

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZULYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 75.000,-
3. Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bukittinggi, 06 Oktober 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Minda Hayati, SH.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 72 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. RAHMAD EFFENDI bin MAINURLIS SL BASA;
2. FITRIZA binti MAWARDI St. PAMENAN, keduanya bertempat tinggal di Jorong Patangahan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I dan Pemohon II;

Maikhkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan pernikahan di muka persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pernohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 8 Desember 1995, di kampung halaman orang tua Pemohon II, di Desa Setia Andilan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, di hadapan Qadhi yang menikahkan bernama Abdul Aziz, dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mawardi, dengan saksi-saksi bernama Habiburrahim dan Andi, dengan mahar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut Syariat Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II penuhi, namun karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, mengakibatkan Pemohon I dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon II tidak mempunyai data Akta Nikah;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Petangahan, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yang bernama:
 - 1.1. Nia Fitri Effendi, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 1998;
 - 1.2. Rahma Dwi Lavenia Effendi, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2000;
 - 1.3. Fikri Putra Effendi, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2004;
 - 1.4. Abil Alfarizi, laki-laki, lahir tanggal 6 Februari 2007;
 - 1.5. Fahry Aditya Effendi, laki-laki, lahir tanggal 27 Januari 2015;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan, baik larangan menurut Syariat Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyalah pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Rahmad Effendi bin Mainurlis St. Basa) dengan Pemohon II (Fitriza binti Mawardi St. Pamenan) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995, di Desa Setia Andilan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada PPN yang berwenang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Bukittinggi telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt., tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zuhijjah 1436 Hijriyah, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pemohon I dan Pemohon II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bukittinggi telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, yaitu dengan telah mengabaikan fakta peristiwa tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang senyatanya dihadiri langsung oleh saksi-saksi yang Pemohon I dan Pemohon II hadirkan di persidangan (saksi I. Yusrizal bin Nurdin dan saksi II. Habib bin Amiruddin), bahkan kedua saksi menyatakan secara tegas dan terang tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1995 di rumah Wali Hakim di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian ditegaskan lagi dengan kehadiran kedua orang saksi tersebut pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
2. Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah mengabaikan fakta peristiwa tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata-nyata dilaksanakan secara terang-terangan, bahkan dihadiri oleh Kepala Desa setempat dan dilangsungkan di rumah Wali Hakim, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup serumah dan bergaul sebagaimana layaknya kehidupan suami istri selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, bahkan telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, serta tidak adanya istri lain bagi Pemohon I selain Pemohon II, dan begitu juga tidak ada suami lain Pemohon II selain dari Pemohon I. Keterangan mana telah nyata-nyata ditegaskan oleh saksi-saksi yang Pemohon I dan Pemohon II hadirkan di persidangan. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Pemohon I dengan Pemohon II dapat hidup serumah, seranjang dan melakukan hubungan biologis selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, bahkan telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat Minangkabau yang *nota bene* mayoritas muslim dan masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" tanpa adanya pernikahan yang sah dan sesuai dengan agama yang Pemohon I dan Pemohon II anut. Kalaulah seandainya Pemohon I dengan Pemohon II hidup serumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, tentu saja orang tua, keluarga, pemuka masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan yang nyata-nyata beragama Islam telah dari awal resah dan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan dua orang saksi dan adanya mahar dalam pernikahan, atau dengan kata lain syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan agama Islam yang Pemohon I dan Pemohon II anut telah terpenuhi secara keseluruhan, yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya 2 (dua) orang saksi dan adanya mahar;

5. Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah salah menilai keterangan saksi-saksi yang Pemohon I dan Pemohon II hadirkan di persidangan dengan mengemukakan pertimbangan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sepanjang yang menyangkut dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab dan kabul tidak terbukti (paragraf ke 4 halaman 8 Penetapan), padahal kedua saksi telah membuktikan adanya peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam dan telah terpenuhinya rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;
6. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II yang sangat awam, dalam hal ini sebenarnya dengan mendasarkan pertimbangan kepada keterangan saksi *an sich* sudah cukup untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti dan sah, namun demikian, apabila Pengadilan Agama Bukittinggi menganggap alat bukti saksi belum cukup, sudah seharusnya Pengadilan Agama Bukittinggi menerapkan alat bukti lain, seperti meminta sumpah *suppletioir* (sumpah pelengkap) kepada Pemohon I dan Pemohon II dan atau menerapkan alat bukti persangkaan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, seolah-olah Pengadilan Agama Bukittinggi menutup mata dan buta terhadap realitas sosial masyarakat yang telah mengakui dan tidak ada sedikitpun meragukan kebenaran pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga pada akhirnya Pengadilan Agama Bukittinggi telah menghasilkan kesimpulan yang keliru, salah dan menyesatkan serta merugikan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bahwa perlu Pemohon I dan Pemohon II sampaikan kepada yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Majelis Hakim Agung, Pemohon I dan Pemohon II menyadari akan kebodohan dan kelalaian selama ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II telah beriktikad baik untuk mengajukan permohonan ini guna memperoleh bukti pernikahan menurut peraturan yang berlaku, akan tetapi iktikad baik Pemohon I dan Pemohon II tidak dihargai, bahkan diperiksa secara emosional, sehingga dengan adanya penolakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menimbulkan kekalutan dan kecemasan yang luar biasa bagi Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak, terutama tentang keberlangsungan pendidikan dan status hukum serta administrasi kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran tanpa adanya penetapan pernikahan dari Pengadilan, dan apabila Bapak juga sependapat dengan Pengadilan Agama Bukittinggi, tentukan akan menimbulkan kemudharatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak dikemudian hari, lalu kemana lagi kami akan mengadakan persoalan ini, dan bagaimana lagi kami harus meyakinkan Bapak tentang kebenaran fakta pernikahan kami yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam yang dari kecil telah kami anut dan kami yakini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995, di Desa Setia Andilan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, ada wali, ada dua orang saksi dan ada pula maharnya. Substansi sahnya suatu pernikahan adalah ketika terbukti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pernikahan tersebut ada dilaksanakan, ada wali dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tentang nama nama para saksi, bukanlah hal yang substantif, mengingat pernikahan tersebut telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu pernikahan tersebut telah diketahui oleh masyarakat di lingkungan para Pemohon dan telah diperoleh 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Rahmad Effendi bin Mainurlis St. Basa dan kawan, membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt., tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zuhijjah 1436 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka blaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **RAHMAD EFFENDI bin MAINURLIS St. BASA**, 2. **FITRIZA binti MAWARDI St. PAMENAN** tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt., tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zuhijjah 1436 Hijriyah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rahmad Effendi bin Mainurlis St. Basa) dengan Pemohon II (Fitriza binti Mawardi St. Pamenan) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1995, di Desa Setia Andilan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, guna dilakukan pencatatan dalam daftar Akta Nikah yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak,

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya-Blaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,



Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19690414 198803 1 005.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id> E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

: Un.04/F.I/PP.00.9/5905/2019

Pekanbaru, 22 Juli 2019

: Masa

: (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

: Kepada

: th. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

: Provinsi Riau

: *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RESTI AYU RAHMADANI

NIM : 11521201497

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Perpustakaan UIN Suska Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul Analisis maqashid asy-syariah terhadap pembatalan putusan pengadilan agama nomor 01/Pdt.P/2015/PA.Bkt oleh putusan mahkamah agung nomor 72/K/Ag/2016 tentang isbat nikah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 11005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25157
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/PP.000/5905/2019 Tanggal 22 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : RESTI AYU RAHMADANI
2. NIM / KTP : 11521201497
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : ANALISIS MAQASHID ASY-SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 101/PDT.P/2015/PA.BKT OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ISBAT NIKAH
7. Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Resti ayu rahmadani dilahirkan di Sungai Puar, Kabupaten Agam Sumatera Barat, pada tanggal 28 Januari 1997 dari pasangan ayahanda Edison (alm) dan ibunda Fauza. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara.

Adapun riwayat pendidikan yang telah penulis tempuh di antaranya yaitu, pertama belajar di Taman Kanak-Kanak Eka Mulya di Rantau Panjang Provinsi Jambi selama satu tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Kapalo Koto sungai puar selama 6 (enam) tahun dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai Sungai Puar selama 7 (tujuh) tahun yaitu 3 (tahun) di Madrasah Tsanawiyah tamat pada tahun 2011 dan 4 (empat) Tahun di Madrasah Aliyah tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 01 Februari sampai tanggal 30 Maret 2018. Kemudian penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Pada tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Penulis melaksanakan penelitian dengan judul, **“ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 72/K/AG/2016 TENTANG ISBAT NIKAH”**. Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan hasil ujian munaqasyah, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum (SH).